

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdullah Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok.
- Ani Sri Wahyuni, 2010, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Djafar Saidi, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ganjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- HAW. Widjaja, 2011, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Juniarso, 2010, *Hukum Melaksanakan Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Philipus M.Hadjon, dkk, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Raharjo Adisasmita, 2001, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

Riyanita Wulandari, 2011, *Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Ditinjau Dari Hukum Administrasi, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata*, dalam Abdul Halim dan Ick Rangga Bawono, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Siswanto Sunarmo, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Suteki, Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

WJS. Poerwadaminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya

Peraturan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat

Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat

C. JURNAL HUKUM

Angela Mulyani Matei, Herman Karamoy, Linda Lambey, *Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal Unsrat, Vol.8, No.1,2017.

Aridya Wicaksono, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti, *Praktek Penyelesaian Perkara Penyelenggaraan Kewenangan Pejabat Birokrasi yang Berindikasi Tipikor Melalui MOU Antara APIP Dan APH*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.8, No.3,2019.

Epafras Tuidano, Markus Kaunang, Alfon Kimbal, *Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ternate*, Jurnal Unsrat, Vol.1, No.1,2017.

Hendar Ristriawan, Dewi Kania Sugiharti, *Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System*, Jurnal Konstitusi, Vol.14, No.3, 2017.

Henny Juliani, *Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*, Administrative Law & Governance Journal, Vol.2, No.4, 2019.

Maria Grace Damopolii, Leonardus R. Rengkung, Charles R. Ngangi, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado*, ejournal.unsrat.ac.id, Vol.13, No.1A, 2017.

Muhammad Anshori Sudirman, Amiruddin, Lalu Parman, *Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Pagaruyuang Law Journal, Vol.3, No.2, 2020.

Wandi Harmawan, Rabina Yunus, Andi Murfhi, *Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol .5, No.1,2012.

D. INTERNET

<https://jurnalsumbar.com/2019/03/kejari-padang-sidik-dugaan-korupsi-dana-perjalanan-dinas-anggota-dprd-kota-padang-2017/> diakses pada tanggal 14 juni 2021, pukul 13.05 WIB .

<https://sumbar.inews.id/berita/tak-cukup-bukti-penyidikan-kasus-perjalanan-dinas-anggota-dprd-padang-dihentikan-kejari> diakses pada tanggal 21 november 2017, pukul 13.20 WIB.

